

## REVOLUSI MENTAL DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Revolusi mental merupakan salah satu program utama Pemerintahan Joko Widodo. Program ini termasuk dalam NAWACITA 8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa. Revolusi mental merupakan upaya pemerintah untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategis yang diperlukan oleh Bangsa dan Negara untuk mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi. Program ini didasarkan pada masalah utama yang sedang dialami Bangsa Indonesia saat ini, yaitu merosotnya wibawa Negara, lemahnya sendi perekonomian dan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa (“Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental,” 2015).

Selain itu, gerakan revolusi mental diperlukan karena beberapa alasan. Pertama, sampai saat ini, ada banyak kekuatan di luar yang menginginkan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang terkandung di Indonesia. Dahulu, Negara-negara Barat menjajah Nusantara untuk mengambil sumber daya alamnya. Namun hari ini, penjajahan dan peperangan untuk mengambil sumber daya alam tidak lagi dibenarkan lagi. Walau demikian, keinginan negara Barat untuk mengambil SDA kita tidak hilang. Namun, mereka akan menempuh cara yang lain, yang lazim dikenal dengan perang proksi (*proxy war*). Kekuatan besar dunia hari ini berebut mempengaruhi pengambil kebijakan di Indonesia agar keinginan mereka untuk mengambil SDA dapat terpenuhi. Beberapa hal yang dilakukan diantaranya dengan : membuat pejabat publik menjadi hedonis sehingga melakukan korupsi; menyebarkan narkoba dan terorisme; membiarkan kebijakan tidak berjalan dengan baik sehingga timbul kemiskinan dan pengangguran. Fenomena ini merupakan cara mereka untuk melemahkan Bangsa Indonesia dan keinginan mereka dapat terwujud. Kedua, beberapa data dan fakta menunjukkan bahwa manusia Indonesia masih memiliki integritas, kompetensi, etos dan budaya yang lemah. Contohnya adalah data mengenai indeks korupsi Indonesia yang masih tinggi. Indeks inovasi Bangsa Indonesia yang masih kalah dari negara Asia Tenggara lain. Kesenjangan yang masih tinggi antara Indonesia Barat dan Timur. Angka kemiskinan dan penyakit sosial yang tinggi. Peredaran narkoba, pornografi dan minuman keras yang tidak terkendali. Kurangnya budaya berlalu-lintas dan lemahnya budaya antri manusia Indonesia. Kondisi ini dapat melemahkan kedaulatan bangsa dan meningkatkan peluang bangsa lain untuk menguasai SDA Indonesia.

Oleh karena itu, gerakan revolusi mental dihadirkan kembali untuk mengubah kualitas manusia Indonesia. Gerakan ini merupakan gerakan untuk mengubah cara pandang, cara pikir, cara kerja, cara hidup, sikap dan perilaku manusia Indonesia. Perubahan hal-hal tersebut diharapkan akan mendukung terwujudnya tujuan Bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur.

Istilah revolusi mental sebenarnya bukan istilah baru. Istilah ini pertama kali oleh Presiden Pertama RI, yaitu IR. Soekarno pada pidato kenegaraannya pada tanggal 17 Agustus 1957. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno menyebutkan bahwa revolusi mental merupakan suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala nyala. Secara sederhana, manusia baru Indonesia yang dimaksud Presiden Soekarno saat itu adalah manusia Indonesia yang berintegritas, bersemangat, memiliki visi dan ambisi maju serta memiliki etos kerja tinggi dan pantang menyerah ketika menemui kesulitan.

Latar belakang Presiden Soekarno mencetuskan gerakan revolusi mental adalah untuk mempercepat revolusi yang sedang bergulir saat itu. Presiden Soekarno menginginkan Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, tidak tergantung pada negara lain. Selain itu, Presiden Soekarno tidak menginginkan Indonesia memihak pada salah satu kekuatan besar (Blok Kapitalis dan Blok Komunis) yang sedang berusaha menancapkan pengaruh di negara yang baru merdeka. Presiden Soekarno berpikiran bahwa negara yang berdaulat dapat dicapai melalui kedaulatan pada tiga aspek, yaitu aspek politik, ekonomi dan budaya. Gerakan revolusi mental adalah gerakan yang diharapkan mampu mewujudkan tiga aspek tersebut.

Gerakan revolusi mental meredup pada masa pemerintahan orde baru hingga masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Gerakan ini kembali dibangkitkan oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintahan Joko Widodo menyebutkan gerakan revolusi mental dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 - 2019. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyebutkan gerakan ini pada pidato kenegaraannya tanggal 17 Agustus 2015. Dan pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental yang merupakan penjabaran teknis dari kegiatan revolusi mental.

Ada tiga tujuan gerakan revolusi mental, yaitu : mengubah cara pandang, pikir dan sikap, perilaku dan cara kerja; membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik; dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Sementara itu, ada tiga nilai revolusi mental yang perlu dimiliki oleh Bangsa Indonesia, yaitu integritas, etos kerja dan gotong royong (“Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental,” 2015).

Gerakan revolusi mental, tidak hanya ditujukan untuk aparat pemerintah saja, tetapi juga untuk kalangan swasta dan masyarakat. Gerakan ini ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia dan terdiri dari beberapa komponen. Dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental disebutkan bahwa gerakan revolusi mental terdiri dari beberapa komponen, yaitu gerakan Indonesia melayani, gerakan Indonesia bersih, gerakan Indonesia tertib, gerakan Indonesia mandiri dan gerakan Indonesia bersatu. Gerakan Indonesia melayani dikoordinatori Kementerian PAN RB, gerakan Indonesia bersih dikoordinatori Kemenko Maritim, gerakan Indonesia tertib dikoordinatori Kemenko Polhukam, gerakan Indonesia mandiri dikoordinatori Kemenko Perekonomian dan gerakan Indonesia bersatu dikoordinatori Kemendagri.

Sementara itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) difokuskan pada gerakan Indonesia melayani. Gerakan ini bertujuan agar ASN diharapkan memiliki perilaku melayani. Detail kegiatan gerakan Indonesia melayani adalah :

1. Peningkatan Kapasitas SDM ASN
2. Peningkatan Penegakan Disiplin
3. Penyempurnaan Standar Pelayanan E-Gov
4. Penyempurnaan Sistem Manajemen Kinerja
5. Peningkatan perilaku pelayanan
6. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi)
7. Penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi)
8. Peningkatan Penyediaan Sarpras
9. Peningkatan Penegakan Hukum Dan Aturan Di Bidang Pelayanan Publik
10. Penerapan Sistem Penghargaan Dan Sanksi Beserta Keteladanan Pimpinan

Revolusi budaya pelayanan publik yang diharapkan terdiri dari budaya kerja berintegritas, berorientasi hasil dan sinergis. Budaya pelayanan berintegritas merupakan budaya untuk mengutamakan kejujuran, dan transparansi dalam memberikan pelayanan serta berkomitmen tinggi untuk mewujudkan pelayanan yang baik. Budaya kerja yang

berorientasi hasil berarti bahwa ASN harus mendahulukan kepentingan publik dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Selain itu, ASN harus mampu mewujudkan manajemen kualitas dan peduli pada kearifan lokal dalam pemberian pelayanan. Budaya sinergis bermakna bahwa pelayanan publik harus dilakukan dengan koordinasi, kolaborasi dan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, diperlukan penguatan fungsi pengawasan berbagai pihak (Nursalman, Mahendrati, & Salmon, 2018).

Pada aspek pelayanan publik, ada beberapa indikator keberhasilan program revolusi mental. Indikator tersebut adalah kepuasan warga terhadap pelayanan publik meningkat; standar pelayanan publik meningkat; penyederhanaan prosedur pelayanan publik; keterbukaan informasi; meningkatnya kepastian pelayanan; dan efisiensi biaya pelayanan ("Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental," 2015).

Strategi internalisasi gerakan dan nilai revolusi mental dilakukan pada jalur birokrasi, pendidikan dan swasta ("Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental," 2015). Untuk jalur birokrasi, salah satu kegiatan teknis revolusi mental adalah dengan melaksanakan diklat revolusi mental untuk ASN. Pada diklat tersebut, ASN didorong untuk mampu mengidentifikasi masalah apa yang terjadi di organisasinya yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan sekaligus merancang solusi kongkrit untuk masalah tersebut. Dengan demikian, ASN diharapkan dapat mengubah pola pikir dan pola kerjanya dalam melaksanakan pelayanan publik. Oleh karena itu, kehadiran program revolusi mental ini diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah (Shafiera Amalia).

## **Referensi**

- Nursalman, A., Mahendrati, Y., & Salmon, J. J. (2018). *Pelayanan Publik di Era Digital*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental. (2015). Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Retrieved from [https://www.kemerkopmk.go.id/sites/default/files/pengumuman/Revolusi Mental.pdf](https://www.kemerkopmk.go.id/sites/default/files/pengumuman/Revolusi%20Mental.pdf)
- Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental